

**RINGKASAN PENELITIAN**

Judul Penelitian : Penegakan Terhadap Pelanggaran Izin Keimigrasian Yang Dilakukan Oleh Orang Asing Di Indonesia (Studi Di Surabaya)

Ketua Peneliti : Sinar Ayu Wulandari

Pembimbing : Harjono

Anggota Peneliti : Lilik Pudjiastuti  
Abdul Shomad  
Lanny Ramly

Sumber biaya : Dana Rutin Universitas Airlangga  
Nomor: 6128/JO3/PL/1998  
Tanggal 24 Agustus 1998

-----  
Isi Ringkasan

Dengan meningkatnya jumlah lalu lintas orang asing yang masuk/keluar wilayah Indonesia, maka pemerintah perlu melakukan penyeleksian hukum terhadap keberadaan orang asing di Indonesia. Berdasarkan kebijaksanaan selektif pemerintah hanya membuka pintu bagi masuknya orang asing yang memberikan manfaat bagi bangsa dan negara Indonesia, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1995 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian.

Ketentuan tentang Izin Keimigrasian merupakan salah satu sarana untuk menyeleksi dan mengawasi keberadaan/ kegiatan orang asing di Indonesia. Berdasarkan pemantauan lapangan ternyata Izin Keimigrasian ini sering dilanggar oleh orang asing, oleh karena itu perlu diadakannya penegakan hukum terhadap pelanggaran Izin Keimigrasian.

Dari uraian di atas, maka dapat ditemukan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan masalah pelanggaran Izin Keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing di Indonesia, antara lain :

1. Bagaimana penerapan sanksi administrasi oleh Pemerintah terhadap pelanggaran Izin Keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing di Indonesia ?
2. Bagaimana upaya penyelesaian melalui lembaga peradilan dalam rangka penegakan hukum terhadap pelanggaran Izin Keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing di Indonesia ?

Penelitian ini bersifat **juridis normatif dan sosiologis** dengan tumpuan pada telaah teknis yuridis dan aspek empiris dari hukum positif. Dengan menggunakan metode deduktif data yang dipergunakan sebagai acuan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan Pejabat Imigrasi yang berwenang melakukan penegakan hukum terhadap orang asing, yaitu Kepala Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian di Surabaya dan Ketua Panitia Pengadilan Negeri Surabaya.

Sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan terutama yang berkaitan dengan obyek permasalahan. Selanjutnya data yang telah berhasil dikumpulkan akan dianalisa secara kualitatif, yaitu data yang terkumpul dianalisa dengan menggunakan studi interpretasi menurut peraturan perundang-undangan, sehingga dapat diambil kesimpulan mengenai upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran Izin Keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing.

Ruang lingkup penelitian ini hanya di Surabaya, dengan pertimbangan dana, waktu dan tenaga yang terbatas. Namun dapat dikatakan bahwa Surabaya sebagai kota terbesar kedua setelah Jakarta arus lalu lintas orang asing tetap tinggi, baik sebagai wisatawan ataupun sebagai tenaga kerja asing, sehingga cukup relevan untuk dilakukan penelitian.

#### Kesimpulan dan saran

Penegakan hukum yang dilakukan terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian dilakukan dengan 2 sifat, yaitu preventif dan represif. Penegakan hukum yang bersifat preventif adalah penegakan hukum melalui pengawasan terhadap masuk/keluarnya orang asing di wilayah Indonesia serta keberadaan mereka di Indonesia. Pengawasan ini baik bersifat administratif (pengurusan izin) juga pengawasan lapangan. Sedangkan penegakan hukum yang represif adalah melalui penerapan sanksi, baik pidana maupun administrasi.

Pada kenyataannya sanksi yang seringkali diterapkan oleh pemerintah adalah sanksi administrasi yang berupa tindakan keimigrasian, hal ini dengan pertimbangan politis, ekonomi, sosial dan budaya serta keamanan, sehingga untuk lebih efektif dan efisien sanksi administrasi yang berbentuk tindakan keimigrasian hampir 100% dilakukan untuk menangani kasus pelanggaran izin keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing di Indonesia.

